

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian bab I pendahuluan disajikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikansi Penelitian, Penjelasan istilah dan *novelty* (kebaharuan).

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, ras dan suku bangsa dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini bukan dijadikan ajang pemecah persatuan dan kesatuan bangsa, akan tetapi justru dijadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah- tengah pluralisme budaya yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan adanya sikap menghargai antara budaya yang satu dengan yang lain. Jika sikap menghargai dapat diciptakan, maka hidup berdampingan secara damai antara golongan yang berbeda budaya akan dapat diciptakan. Untuk itu perlu dibentuk karakter bangsa yang mampu menghargai budaya orang lain dengan tetap menjaga komitmen terhadap budayanya sendiri.

Keberagaman merupakan warna abadi bangsa Indonesia yang telah terpatri beratus tahun, bahkan mungkin beribu tahun lamanya. Di satu sisi, jika kemajemukan ini dapat diharmonisasi dan diberdayakan akan menjadi kekayaan,

kekuatan dan aset bangsa yang maha dahsyat (Zamroni, 2011). Demikian juga sebaliknya, jika masyarakat tidak memahami makna keberagaman, maka sudah pasti perbedaan akan menjadi “mesin pembunuh” yang paling berbahaya di muka bumi. Terjadinya pembantaian di Ruanda, Yugoslavia, konflik etnis di Yaman, Irak, Afganistan dan beberapa negara lainnya merupakan bukti kongkrit rentannya keberagaman.

Masyarakat menyadari dan mengakui bahwa bangsa Indonesia dibangun atas dasar pondasi keragaman etnis, ras, agama, golongan, budaya, adat istiadat, dan daerah. Kesatuan Indonesia adalah kesatuan yang berdasarkan kesadaran moral dan perjanjian suci antar masyarakat untuk mengakui pluralitas yang ada sebagai sarana untuk bersatu. Momentum persatuan masyarakat Indonesia yang disetujui oleh para pendiri bangsa dan semua masyarakat Indonesia tercetus lewat sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini menjadi dimensi dan bukti penting telah terbentuknya nilai-nilai multikultur pada hati sanubari setiap masyarakat Indonesia.

Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat yang cinta damai, saling tolong menolong (gotong royong), toleransi, dan mencintai kebersamaan. Pada dimensi legal formal lembaga kenegaraan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945), dan Bentuk Negara Kesatuan merupakan legitimasi adanya jaminan nilai-nilai multikultur sebagaimana dibangun oleh para pendiri bangsa (Jayanegara, 2008).

Kebersamaan yang telah dibangun para pendiri bangsa kini dihadapkan pada tantangan, menurunnya moralitas masyarakat, memudarnya nilai-nilai nasionalisme, terbaikannya identitas nasional, meningkatnya konflik antar etnis,

ras dan agama, dan semakin menguatnya isu disintegrasi bangsa (Asyumardi, 2002). Bahkan menurut analisis Jayanegara (2008: 7) telah terjadi degradasi kesadaran dan upaya penghapusan terhadap empat pilar aset nasional, yakni: NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditandai dengan adanya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri, terjadinya konflik antar ras, suku, agama, golongan, adanya upaya menjadikan Piagam Jakarta untuk mengganti pembukaan dan adanya upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, merupakan upaya terstruktur yang akan meruntuhkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia atau dengan kata lain berarti juga pengingkaran terhadap kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Realitas bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, agama, bahasa, adat, dan kebiasaan telah muncul sejak lama dan menjadi agenda permasalahan yang sangat kompleks. Hal tersebut terlihat pada peristiwa-peristiwa di Aceh, Sampit, Sambas, Ambon, dan daerah lain, benturan antar kelompok dengan ikatan primordial fanatis dan membabi buta telah menyebabkan timbulnya korban jiwa dan harta benda. Benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat muaranya akan mengancam integritas dan ketahanan bangsa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, tidak berlebihan apabila sebagai masyarakat multikultur mewaspadaai benturan antar peradaban (*clash of civilization*), (Sudrajat, 2015: 2).

Terjadinya kerusuhan pada tahun 2019 menimpa para mahasiswa papua yang berada di Surabaya, hal ini dipicu dengan adanya berita perusakan bendera pusaka oleh oknum mahasiswa Papua di asrama, namun tanpa melakukan

investigasi terlebih dahulu aparat dan ormas melakukan penyerangan pada asrama mahasiswa Papua, Realitanya, dari hasil pemeriksaan kepada mahasiswa, mereka tidak mengetahui perihal pengerusakan bendera pusaka di depan asrama mereka, dan aksi tersebut berujung pada kerusuhan di Manokwari Sorong Papua Barat (Ananda, 2019). Kerusuhan kembali terjadi di kota Wamena Jayapura, Provinsi Papua, kali ini dipicu berita yang belum jelas kebenarannya tentang pendidik yang mengatakan kata-kata rasis pada peserta didik sehingga menyulut emosional warga, aksi pembakaran bangunan serta pengepungan warga pendatang tidak terelakan, sebanyak 1.500-an warga mengungsi untuk mendapatkan perlindungan (Azanella, 2019).

Masyarakat Bali sebagai bagian dari Indonesia tidak terlepas dari kondisi ini. Konflik kultural (antar kasta dan antar banjar) juga terus terjadi pada masyarakat Bali, yang merupakan cerminan bentuk krisis akan nilai-nilai kultural pada masyarakat. Ada beberapa pretensi yang menjadi rasional terjadinya konflik kultural pada masyarakat Bali, yaitu: industri pariwisata yang berkembang menjadi sumber ekonomi yang dikompetisikan oleh setiap masyarakat, baik masyarakat Bali sendiri maupun masyarakat luar, perkembangan masyarakat Bali yang sangat heterogen seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata, adanya gerakan ajeg Bali sebagai bentuk pertahanan budaya Bali terhadap ancaman dari budaya luar dan pengaruh globalisasi dengan semua implikasinya baik yang bersifat positif maupun negatif. Dantes menguraikan kerisauannya berkaitan dengan berbagai potensi konflik kultural yang terjadi pada masyarakat Bali dengan gambaran berikut:

Tantangan yang paling besar dihadapi oleh masyarakat Bali berkaitan dengan keragaman kultural adalah adanya perebutan sumber daya ekonomi sebagai akibat ketimpangan yang terjadi pada masyarakat, kemajuan industri pariwisata yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah migrasi tenaga kerja dari daerah lain, semakin melunturnya kearifan tradisional masyarakat Bali dan masuknya pola budaya asing, yang secara langsung menggerus pola kehidupan tradisional (Dantes, 1989: 234).

Gerakan ajeg Bali yang saat ini sedang dikembangkan oleh masyarakat Bali, sebagai antisipasi terhadap berbagai pengaruh budaya asing dan upaya pertahanan solidaritas budaya, juga ditenggarai akan menjadi pemicu terjadinya konflik kultural pada masyarakat Bali. Gerakan ajeg Bali akan menjadi kekuatan dan pertahanan terhadap tekanan serta pengaruh budaya asing, namun di sisi lain akan menjadi penyebab terjadinya berbagai konflik kultural pada masyarakat Bali sendiri. Terlebih dengan adanya upaya kelembagaan terhadap gerakan ajeg Bali, melalui institusionalisasi pada lembaga pendidikan, keluarga dan pranata sosial lainnya. Misalnya, kewajiban untuk menggunakan pakaian sembahyang pada hari-hari suci Hindu bagi siswa yang beragama Hindu, sedangkan pada hari-hari besar agama lain (Islam, Kristen, Budha), tidak ada kewajiban bagi siswa non-Hindu untuk menggunakan pakaian sembahyang. Sementara siswa (SD, SMP, SMA) yang ada di wilayah Bali, khususnya di daerah perkotaan terdiri dari beragam agama, ras, etnis, adat, daerah dan budaya. Adanya perbedaan “perlakuan” terhadap siswa dengan etnis atau agama tertentu akan menyebabkan terjadinya dominasi dan “rasa penguasaan” terhadap siswa dengan etnis atau agama lainnya, karena etnis atau agama mereka secara kuantitatif jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Keadaan sosial masyarakat Buleleng (Badan Pusat Statistik, 2018) bahwa mayoritas penduduk Buleleng beragama Hindu 89%, Islam 9,14%, Katholik 0,96%, Protestan 0,22%, Budha 0,54% dan konghucu 0,01%. Keadaan jumlah berbagai pelanggaran atau kejahatan dari 19 jenis kejahatan dari setiap tahun meningkat, pada tahun 2017 terjadi tindak kejahatan tertinggi dengan total 307 tindak kriminal dan lebih mencengangkan lagi pelanggaran pada tingkatan pendidikan tercatat 114, dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 11, SLTP sebanyak 11, SLTA sebanyak 86 dan sarjana sebanyak 6. Pada sisi lain Buleleng juga dilanda konflik sosial, seperti konflik desa adat pada tahun 2010 di desa Lemukih yang dipicu saling klaim kepemilikan tanah desa adat (Wibisono, 2010). Kasus perkelahian antar kelompok pria di Buleleng tepatnya di Seririt awal munculnya masalah tersebut karena kesepakatan antar kelompok untuk tanding di lahan kosong (Wicaksono, 2016).

Permasalahan tersebut apabila tidak memperoleh perhatian dan penanganan secara bijaksana dan sistematis, akan memiliki dampak yang lebih luas dan dapat mengganggu kesinambungan dan kestabilan dalam pembangunan Nasional. Muara dari segala kekhawatiran tersebut adalah ancaman terhadap integrasi bangsa yang semakin terbuka lebar. Bila diamati, agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk selalu menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat di bumi ini. Realitanya agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Misalnya, dengan mengintensifkan forum dialog antar umat beragama dan aliran kepercayaan (dialog antar iman), membangun

pemahaman keagamaan yang lebih pluralis dan inklusif, dan memberikan pendidikan tentang pluralisme dan toleransi beragama melalui lembaga pendidikan.

Terjadinya krisis kultural ini tidak terlepas dari “teralinasinya” nilai-nilai budaya bangsa dari proses pendidikan. Tilaar (2004: 132) mengatakan pendidikan di Indonesia telah kehilangan momentumnya dalam mentransformasikan nilai-nilai budaya bangsa dalam proses pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan medium internalisasi, pelestarian dan pengembangan budaya bangsa bagi setiap anak didik. Nilai-nilai budaya yang bersifat adiluhung terabaikan dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dominasi dan hegemoni praktik pendidikan nasional yang cenderung mengabaikan nilai-nilai humanisme-religius, karena dikuasai oleh ideologi pasar kapitalisme yang cenderung materialistik, roh pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai moral yang suci seiring berjalannya waktu cenderung menampilkan gejala sekularisasi (Atmaja, 2008; Sukadi, 2007). Sedangkan dalam realita hidup masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Bali pada khususnya, cara berpikir dan nilai-nilai seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat yang humanis dan religius. Praktik pendidikan seperti ini ditengarai akan menjauhkan dunia pendidikan dari tujuan pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, dan makin menggelincirkan generasi masa depan bangsa Indonesia ke arah individualisme, materialisme, hedonisme, konsumerisme, instanisme, glamorisme, dan sejenisnya yang dibawa oleh faham dunia sekuler (Hadis, 2006). Praktik pendidikan seperti ini tampak dalam aktivitas pembelajaran di kelas yang kering dari sentuhan nilai-nilai sosial kultural dan

menonjolkan pendidikan pada upaya pencapaian peningkatan kecerdasan intelektual yang cenderung rasionalistik.

Peran pendidikan menjadi kunci pengurai masalah sosial. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, telah merumuskan tujuan pendidikan nasional adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab”. Permendiknas No 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan, globalisasi yang terjadi saat ini akan membawa dampak berubahnya sistem tatanan kehidupan, sehingga peserta didik saat ini sangat perlu dibekali berbagai pengalaman untuk menghadapi hal tersebut. Globalisasi membuat tatanan kehidupan manusia semakin kompleks sehingga sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi sebagai penunjang daya saing sumber daya manusia dalam kehidupannya (Marhaeni, 2013).

Dantes dkk (2008: 76) dalam penelitiannya tentang pengembangan model pengorganisasian materi multikultur dalam pembelajaran IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan di SMP di Provinsi Bali menemukan bahwa: hanya 25 % domain multikultur yang terakomodasi dalam desain pembelajaran guru, sedangkan 57 % adalah materi yang tercantor pada kurikulum formal, dan 18 % tentang masalah-

masalah sosial-budaya aktual di masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan masih lemahnya pengintegrasian pendidikan multikultur dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS, sehingga diperlukan model pengorganisasian materi pendidikan multikultur dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS, pengembangan model pendidikan multikultur, dan pengembangan model evaluasi pendidikan multikultur. Bahkan kompetensi multikultural dalam praktik pembelajaran IPS ditenggarai baru sebatas “pengetahuan” tentang keberagaman budaya (pengenalan pakaian daerah, etnis, agama dan budaya) belum menyentuh aspek nilai dan kompetensi multikultural (Mahfud, 2010a). Sedangkan, ciri utama pembelajaran IPS adalah adanya proses pemahaman, internalisasi dan pengamalan dalam praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menjawab kebutuhan tersebut, kebijakan untuk penyempurnaan kurikulum dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2014, berdasarkan permendikbud No 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 secara bersama-sama. Selanjutnya dalam Permendikbud No 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah dasar madrasah ibtidaiyah disampaikan muatan dan acuan pembelajaran terdiri atas: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam. Esensi peralihan kurikulum tersebut pada sistem pembelajaran yang semula KTSP menganut pendekatan mata pelajaran dan pada kurikulum 2013 menganut pendekatan tematik. Berbicara tentang masalah sosial yang ada dalam kurikulum sebelumnya ditekankan pada mata pelajaran IPS dan PKn.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran IPS ditenggarai baru sebatas pengetahuan tentang keragaman budaya (pengenalan pakaian daerah, etnis, agama dan budaya) belum menyentuh aspek kompetensi multikultur (Mahfud, 2010b).

Raihani (2018) mempertajam hal tersebut dengan menyatakan bahwa ada ketidak konsistensian antara kebijakan yang tertuang melalui UU Pendidikan tahun 2003 dengan praktiknya, hal ini terlihat dari guru dienam sekolah tidak menggunakan pendidikan yang mempromosikan toleransi dan keragaman sebagai bagian dari kurikulum, para guru juga belum paham apabila pendidikan multikultur adalah salah satu tanggung jawab pendidikan mereka . Sedangkan dalam proses kemampuan pemecahan masalah, guru menjadi kunci keberhasilan hal tersebut.

Sudiatmaka & Lasmawan (2012) menyampaikan, teknik ceramah selalu digunakan oleh guru untuk menghiasi ruang kelas dalam pembelajaran IPS, sehingga menjadi mata pelajaran yang membosankan dan bersifat hapalan semata. Hal ini menjadikan penanaman nilai-nilai sosial yang harusnya dapat dipahami dengan baik oleh siswa menjadi terkesampingkan. Dilihat dari ciri utama pembelajaran IPS adalah adanya proses pemahaman, internalisasi dan pengalaman dalam praktek bermasyarakat . Situasi ini selaras dengan riset Kertih (2019) yang menemukan pembelajaran IPS belum bisa diajarkan secara terpadu karena belum tersedianya guru pengajar dengan latar belakang pendidikan IPS. Mayoritas guru yang mengampu mata pelajaran (mapel) IPS di SMP ialah guru lulusan dari Sarjana Pendidikan Geografi, Sejarah, Sosiologi atau Ekonomi.

Schlein et al, 2016, menerangkan praktik studi sosial perlu dikaitkan dengan budaya dan identitas dengan tujuan untuk mendapatkan kompetensi antar budaya agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa dalam hal akademisi, perilaku, dan kebudayaan. Kemudian Alabaş (2018), menambahkan tujuan utamanya meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesadaran nasional, nilai-nilai individual, nilai-nilai sosial, pencapaian proses mental (pengetahuan dan pemahaman) dan memperoleh keterampilan dan kemampuan bermasyarakat. Oleh sebab itu peran pengajaran serta kualifikasi guru sangat berpengaruh terhadap sikap multikultur siswa .

Penjelasan di atas menyebabkan hasil belajar IPS dapat kita lihat hanya membuat siswa pintar menghafal fakta-fakta, konsep, dan peristiwa, tetapi kering dan tidak bermakna bagi kehidupan riil siswa (Sukadi, 2007). Belum tampak wujud hasil belajar IPS yang menunjukkan siswa dapat mengamalkan dan mengibadahkan pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan multikulturalnya dalam kehidupan sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Padahal, tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial kultural yang terjadi dalam lingkungan sekolah dan masyarakatnya, sejalan dengan nilai-nilai dan kearifan budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia.

Nugraha et al. (2021) mengemukakan, salah satu faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran di sekolah. Apabila guru berhasil mengelola pembelajaran dengan baik maka dapat memicu minat belajar siswa sehingga hasil belajar siswa

dapat meningkat. Hal ini sependapat dengan Siregar (2015) tinggi rendahnya hasil belajar siswa akan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dan memotivasi belajar siswa. Hal ini dapat dipahami bahwa, menjadi seorang guru bertanggung jawab tidak hanya menjadikan siswa pandai dibidang ilmu pengetahuan namun berasal dari dalam kehidupannya.

Berkaitan pada masalah inti pendidikan IPS inilah maka perlu diajukan suatu solusi. Sebagai bidang studi yang menggunakan bahan kajian melalui masyarakat, pembelajaran IPS di sekolah seharusnya diarahkan pada hal yang kontekstual serta menerapkan isu sosial pada masyarakat menjadi sumber belajar utama serta dijadikan laboratorium pendidikan IPS (Lasmawan, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian (Putriyani et al., 2022), dapat disimpulkan bahwa keahlian guru ketika mengelola kelas berpengaruh pada hasil belajar siswa SD. Hal ini disebabkan karena saat guru mampu mengatur kelasnya maka nantinya terbentuk kondisi kelas yang nyaman sehingga menunjang pembelajaran efisien dengan mengoptimalkan cara belajar. Aktivitas pengelolaan kelas yang baik dapat memaksimalkan prestasi siswa, meningkatkan kegiatan belajar, dan mengimplementasikan pendekatan belajar yang kreatif, inovatif, dan variatif. Oleh sebab itu, guru perlu mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam mengelola kelas agar hasil belajar peserta didik bisa memuaskan. Guru bisa mengasah keterampilan pengelolaan kelas dengan dua cara yaitu dengan pengalaman dan juga dengan belajar.

Kurikulum 2013 (K13) dalam proses pembelajarannya menekankan pada pendekatan saintifik demi tercapainya kompetensi yang terdapat di dalam

pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang meliputi proses mengamati, membuat pertanyaan, menguji coba atau menghimpun informasi, teknik, menganalisa ataupun mengelola informasi kemudian membuat simpulan serta menyampaikan hasilnya berbentuk kognitif, psikomotor ataupun afektif (Handini & Soekirno, 2019; Kurniaman & Noviana, 2017).

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah mayoritas siswa merasakan permasalahan dalam meraih kompetensi kognitif dengan baik. Hal ini dikarenakan guru tidak mengimplementasikan model belajar inovatif yang mampu merangsang siswa belajar. Studi oleh (Nida et al., 2020; Wulandari et al., 2020) mengungkapkan metode konvensional menyebabkan rasa bosan siswa cepat muncul. Selain itu, pembelajaran menjadi pasif sebab guru menjadi titik pusat bukan siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Marhayani & Wulandari (2020) menambahkan apabila siswa tidak aktif dalam proses belajar, maka pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Semestinya guru dapat menerapkan model pembelajaran. Permasalahan pembelajaran lebih khusus dihadapi dalam pembelajaran IPA. Tidak semua siswa menyukai pembelajaran IPS disebabkan karena materi IPA yang sangat luas. Hal tersebut juga ditemukan pada salah satu sekolah dasar.

Nilayuniarti & Putra (2020) pada pengamatan maupun wawancaranya di SD, terutama terkait pelajaran IPS, dinyatakan aktivitas belajar telah mengimplementasikan K13. Tetapi penerapan model belajarnya belum terjadi secara maksimum. Ini bisa diamati pada pencapaian KKM siswa dimana terdapat beberapa siswa tidak mencapai KKM dan masih kurang saat pembelajaran terjadi.

Sebagian dari siswa merasakan kesusahan saat memahami serta mengaplikasikan konsep, sebab tidak termotivasi pada pengembangan maupun penguasaan keahlian bernalar. Ini disebabkan oleh proses belajar yang penyampaiannya terbiasa mempergunakan metode ceramah ataupun tanya jawab yang menjadikan siswa berasumsi muatan IPS ini membuat jenuh serta kurang termotivasi. Sebagai dampaknya, mereka tidak paham akan hal yang guru ajarkan. Pengaplikasian model ini umumnya mengakibatkan siswa pasif, tidak aktif dalam mencari serta mengkonstruksi informasi sendiri terkait materi yang dibelajarkan, tingkat penguasaan rendah serta gampang lupa pada materi yang guru berikan, tidak yakin apabila diberikan peluang saat mengutarakan pendapat ataupun bertanya, mudah menyerah saat membuat kesalahan, serta takut berbuat salah menjadikan level penguasaan serta pengetahuan menjadi minim.

Deskripsi di atas membuktikan hasil belajar siswa kurang memenuhi capaian minimum serta penerapan belajar belum berorientasi pada siswa. Dengan begitu, pembelajaran harus dirubah guna menstabilkan elemen kognitif, psikomotor serta afektif pada siswa. Elemen pengetahuan yang dilaksanakan berupa mengingat, memahami, hingga mencipta. Elemen keterampilan yang diadopsi mencakup kesiapan kerja, proses, hasil, perilaku serta waktu kerja. Melainkan elemen perilaku mencakup perilaku spiritual yang berkaitan pada tuhan serta perilaku sosial yang berkaitan pada sesamanya seperti perilaku bertoleransi, mendalami agama, berintegritas, sopan santun, percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, serta bergotong royong.

Merujuk pada partisipasi siswa pada penerapan belajar serta

mengoptimalkan hasil belajar kognitif, psikomotor maupun afektif, dibutuhkan langkah yang sesuai. Strategi yang dipergunakan yakni pembelajaran berbasis *Problem-Based Learning*. Mulyadi & Ratnaningsih (2022) Pada proses pembelajaran, guru diperlukan mempunyai cara sehingga siswa mampu belajar dengan maksimal, berdasarkan target yang ditentukan. Salah satunya dengan keakuratan penggunaan model belajar, sehingga guru diminta agar paham terhadap beragam model belajar.

Sutrisna et al. (2019) Hal ini juga terjadi di Gugus Dr. Soetomo Kecamatan Denpasar Selatan Tahun Ajaran 2019/2020. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas V diperoleh informasi bahwa kompetensi pengetahuan siswa pada muatan IPS masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi guru, yakni 1) Kurangnya keaktifan dan partisipasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran; 2) Kurang diterapkannya penggunaan model pembelajaran yang inovatif; 3) siswa cenderung jenuh dalam belajar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan guru, menyatakan bahwa guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan penugasan untuk siswa karena merasa kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif, guru mengalami kesulitan dalam menentukan model yang cocok digunakan dengan materi pelajaran IPS, dan juga kurangnya media pembelajaran dari sekolah sehingga menyebabkan guru hanya menggunakan media yang tersedia seperti papan tulis, dan buku sebagai media dan sumber materi. Sehingga hal ini berdampak terhadap rendahnya hasil belajar IPS siswa.

Dilihat dari pemaparan diatas, ini merupakan suatu masalah yang harus

diatasi agar kompetensi pengetahuan siswa menjadi lebih baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu inovasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan IPS siswa. Salah satu model yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran *Problem Based Learning*. Model *Problem Based Learning* merupakan salah satu model yang dapat menumbuhkan kreatifitas dan keaktifan siswa. Model PBL (berbasis masalah) menjadi suatu model yang bisa dimanfaatkan. Dengan PBL ini siswa mendapatkan pengalaman terkait cara penanganan problematika secara nyata, memfokuskan pada penerapan komunikasi, kolaborasi, serta referensi yang ada dalam perumusan gagasan maupun pengembangan keahlian bernalar (Sutrisna et al., 2019).

Pembelajaran berbasis masalah (bahasa Inggrisnya) disebut *Problem Based Learning* (PBL) yang awal kemunculannya dipublikasi di awal Tahun 1970-an sebagai usaha dalam membentuk solusi pada pertanyaan yang ada sesuai kenyataan. PBL ini ialah suatu pendekatan belajar dengan memfokuskan isu keseharian hidup menjadi konteks siswa dalam bernalar kritis, penyelesaian masalah, maupun mendapatkan konsep dari materi (Anwar & Jurotun, 2019). Seperti Barrows (dalam Madyaratri et al., 2022) menegaskan PBL bermakna sebagai model belajar yang diciptakan melalui proses kolaborasi pada penyelesaian masalah, yang mana isu tersebut diberikan pada siswa di awal pembelajaran agar siswa bisa aktif mempergunakan intelektualitasnya sementara guru menjadi fasilitator. Pengaplikasian PBL sangat diperlukan sebagai tujuan menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan agar siswa bisa terbiasa pada kondisi nyata mengarahkannya dengan proses mencari, belajar serta bernalar dengan mandiri.

Era kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini nilai-nilai kearifan lokal sangat perlu untuk dipelajari karena dapat menjadi alternatif pemecahan masalah akibat adanya kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini tanpa melupakan budaya lokal yang ada agar nilai ini selalu terlestarikan serta tidak tergerus oleh arus globalisasi. Maka dibutuhkan sesuatu yang bisa mengaitkan muatan pelajaran IPS pada kehidupan keseharian yang berbasis pada nilai kearifan lokal. Diterapkannya nilai kearifan lokal dalam pembelajaran, guru bisa menanamkan nilai kearifan lokal yang bermanfaat bagi siswa dengan mengamalkan *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membawa dampak positif bagi siswa.

Tri Hita Karana menjadi salah satu nilai kearifan lokal yang muncul dan berkembang pada masyarakat Bali yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dipadukan dengan model *Problem Based Learning* (PBL). *Tri Hita Karana* ialah salah satu konsep kearifan lokal yang ada di masyarakat Bali yang hingga sekarang masih relevan untuk digunakan ditengah gempuran arus globalisasi yang ada. *Tri Hita Karana* bersumber dari tiga kata yaitu “Tri” maknanya tiga, “Hita” maknanya kebahagiaan serta “Karana” bermakna penyebab. Jadi *Tri Hita Karana* bearti tiga sebab kebahagiaan bagi kehidupan manusia (Anjarsari et al., 2017). Menurut Putriasih (2020), *Tri Hita Karana* bermakna tiga elemen yang menyebabkan kebahagiaan manusia melalui keberadaan hubungan baik terhadap tuhan, terhadap sesama maupun hubungan seimbang pada alam. Pada konsep *Tri Hita Karana* ini memfokuskan pada tiga hubungan manusia terhadap kehidupannya yaitu (1) Parahyangan (Hubungan manusia dengan tuhannya atau penciptanya), (2) Pawongan (hubungan manusia dengan sesamanya) serta (3) Palemahan

(hubungan manusia dengan sekitarnya atau lingkungannya) (Suarmini, 2019).

Wiana (dalam Santhi et al., 2019) menyatakan bahwa “mencapai kehidupan yang bahagia dengan melakukan hubungan harmonis dengan Tuhan (Parhyangan), dengan sesama manusia (Pawongan) dan dengan alam lingkungan sekitar (Palemahan) ini merupakan bagian *Tri Hita Karana*”. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dapat disimpulkan bahwa konsep *Tri Hita Karana* adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan yang baik dengan sesama manusia (Pawongan), dan hubungan yang baik dengan lingkungan (Palemahan), hal tersebut harus dilakukan demi keharmonisan dan ketentraman antar sesama makhluk hidup. Sutrisna et al. (2020), ketiga penerapan *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran di Sekolah dijelaskan sebagai berikut: (1) hubungan baik manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan cara sembahyang, melaksanakan yadnya, dan mengamalkan ajaran agama, (2) hubungan baik manusia dengan sesama manusia yaitu dengan cara mengasihi serta saling membimbing, (3) hubungan baik manusia dengan lingkungannya yaitu dengan cara tidak boleh melakukan pemburuan hewan dan penebangan pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena jika hal tersebut dilakukan dapat mengganggu keseimbangan alam. Sehingga dengan diterapkannya nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* dalam pembelajaran, guru bisa menanamkan nilai kearifan lokal yang bermanfaat bagi siswa dengan mengamalkan *Tri Hita Karana* dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membawa dampak positif bagi siswa.

Penerapan model PBL berbasis nilai *Tri Hita Karana* menyediakan

alternatif pemecahan masalah dan pengalaman baru yang menarik dalam muatan pelajaran IPS. Model PBL berbasis nilai *Tri Hita Karana* ini menjadikan siswa untuk termotivasi dalam pembelajaran, dikarenakan pada rangkaian kegiatan pembelajarannya mengaitkan dengan nilai kearifan lokal di sekitar siswa sehingga mampu merangsang peserta didik untuk aktif, kreatif serta selalu berencana mendalami pengalamannya sendiri. Pembelajaran melalui model ini dapat membangun konsep peserta didik yang pengetahuan secara optimal yang sangat mempengaruhi hasil belajarnya (Nilayuniarti & Putra, 2020).

Penyusunan model pembelajaran PBL berbasis THK ini mampu menciptakan beragam problematika dalam penyelesaian masalah, berdasarkan kompetensi perilaku yang ada di K-13. Ini dilandasi oleh potensi afektif pada kompetensi dasar tidak mempunyai materi pokok yang ada pada pembelajaran namun diajarkan secara implisit. Sehingga penting adanya pengawalan penerapan proses belajar yang memfokuskan pada sisi afektif yang perlu ditanamkan pada siswa.

Implementasi konsep *Tri Hita Karana* dapat memberikan suatu pengaruh terhadap sikap multicultural dan hasil belajar karena salah satu konsep *Tri Hita Karana* yakni menjaga keharmonisan terhadap sesama teman dan taat pada perintah agama dan guru akan dapat memberikan suatu hasil yang lebih baik dalam upaya mencapai aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif yang mampu memberikan tuntunan hidup kepada para siswa (Mendra & Watra, 2019; Sriasih et al., 2019; Yunita & Trisiantari, 2019). Siswa akan menjadi lebih taat terhadap tata tertib sekolah, meningkatkan rasa hormat kepada guru

ataupun orang yang lebih tua, menumbuhkan rasa bhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan (Dikta, 2020). Berkaitan pada penjelasan ini, model PBL yang dibuat berbasis THK untuk meningkatkan sikap multicultural dan hasil belajar siswa memberi kontribusi dalam penyeimbangan penyatuan serta keberagaman, memudahkan siswa merawat hubungan bersama kelompok budaya dan berperan efisien pada kebudayaan nasional bersama.

Bertolak pada masalah inilah, hubungan kearifan lokal pada pembelajaran harusnya diikutsertakan melalui penyusunan model belajar yang sesuai pada pengaplikasian K-13 hingga sekarang sudah mulai melaksanakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka Belajar bersinergis pada pengoptimalan kompetensi unggulan di daerah. Merujuk pada itu, riset ini didesain melalui model *Problem Based Learning* (PBL) yang komprehensif berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana* untuk meningkatkan sikap multikultural dan hasil Belajar dimana membuat siswa belajar melalui kebudayaannya sendiri.

Desain model PBL berbasis THK guna mengoptimalkan perilaku multicultural serta hasil belajar siswa sangatlah urgen dilaksanakan menjadi modal sosial dalam pembentukan karakter humanis, berdemokratis, beradab serta bermartabat dalam membahas serta menanggapi problematika sosial dengan baik melalui kaca mata kemajemukan masyarakat. Ini sesungguhnya mampu mendorong timbulnya beragam konflik di masyarakat agar selalu dikembangkan etika *Tri Hita Karana* untuk meningkatkan sikap multikultural sehingga di masa depan, siswa mampu menjadi generasi bernuansa keluarga,

sahabat, serta bertoleransi.

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang teridentifikasi dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Belum adanya upaya yang dilakukan guru dan kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultur dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran IPS.
2. Pendidikan dengan Model PBL yang berkaitan dengan nilai kearifan local belum diintegrasikan pada pembelajaran di SMP. Ini mengakibatkan kurangnya penanaman nilai karakter yang berpondasi kokoh pada budaya lokal.
3. Model pembelajaran yang diterapkan di SMP saat ini belum memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Hal ini dapat menyebabkan keterasingan peserta didik terhadap budayanya sendiri yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung.
4. Kualitas karakter siswa masih harus dimaksimalkan. Siswa seringkali ditemukan berbicara kurang sopan terhadap teman sebayanya, absen tanpa memberi alasan, bertengkar dengan temannya, serta mencoret fasilitas di sekolah.
5. Sampai saat ini, belum ada upaya strategis yang dilakukan guru IPS-SMP di Kota Singaraja untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya masyarakat

dalam proses pembelajaran IPS yang standar kompetensi, kompetensi dasar dan materinya mengandung muatan multikultural.

6. Proses pembelajaran lebih diorientasikan pada pencapaian hasil belajar dan ketuntasan materi, dengan mengesampingkan ketercapaian kompetensi yang mengakomodasikan kearifan lokal dengan nilai – nilai karakternya dan sikap multikultural siswa.

1.3 Pembatasan Masalah

Memperhatikan luasnya permasalahan yang teridentifikasi maka pembatasan masalah dalam penelitian ini penting dikemukakan sehingga pengkajian yang dilakukan menjadi lebih focus.(1) minimnya upaya yang dilakukan guru dan kepala sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan sikap multikultur dalam proses pembelajaran, khususnya proses pembelajaran IPS,(2) belum ada upaya strategis yang dilakukan guru IPS-SMP di Kota Singaraja untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya masyarakat dalam proses pembelajaran IPS yang standar kompetensi, kompetensi dasar dan materinya mengandung muatan kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan sikap multikultural,(3) hanya mengutamakan pencapaian hasil belajar dan ketuntasan materi, dengan mengesampingkan ketercapaian kompetensi kearifan lokal dan sikap multikultural siswa. Dan pada langkah-langkah berikutnya, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembenahan atau peningkatan nilai-nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* dan sikap multikultural dengan mengembangkan model PBL berbasis *Tri Hita Karana* untuk

meningkatkan sikap multikultural dan hasil belajar.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada pembatasan masalah yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

- 1 Bagaimana Implementasi Pendidikan Multikultural siswa SMP di Kota Singaraja ?
- 2 Bagaimanakah Rancang bangun PBL berbasis *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS ?
- 3 Bagaimana Validitas model PBL berbasis *Tri Hita Karana* yang dikembangkan?
- 4 Bagaimana Kepraktisan penerapan model PBL Berbasis *Tri Hita Karana* yang dikembangkan?
- 5 Bagaimana Efektifitas model PBL berbasis *Tri Hita Karana* untuk meningkatkan sikap multicultural dan hasil belajar siswa SMP N 2 Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berpijak pada masalah yang telah dirumuskan, dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan, yaitu:

- 1 Untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Multikultural siswa SMP di Kota Singaraja.
- 2 Untuk mengetahui Rancang bangun PBL berbasis *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS.

- 3 Untuk mengetahui Validitas model PBL berbasis Tri Hita Karana yang dikembangkan.
- 4 Untuk mengetahui kepraktisan penerapan model PBL Berbasis Tri Hita Karana yang dikembangkan.
- 5 Untuk mengetahui Efektifitas model PBL berbasis Tri Hita Karana untuk meningkatkan sikap multicultural dan hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Kota Singaraja.

1.6 Signifikansi Penelitian

Signifikansi yang diberikan melalui pengembangan ini berbentuk manfaat teoretis serta praktis, meliputi:

1) Signifikansi Teoretis

Temuan dari pengembangan ini diharapkan mampu menjadi dasar teori terkait produk pembelajaran yang dikembangkan terutama model PBL berbasis *Tri Hita Karana* akan memperkuat keilmuan IPS yang mencerminkan nilai karakter yang berwawasan sosial, kemasyarakatan dan sikap multikultural

2) Signifikansi Praktis

a. Bagi Siswa

Siswa diharapkan mendapatkan manfaat praktis melalui pengembangan ini, salah satunya lebih tertarik dalam belajar, lebih mendalami kebudayaannya, serta mengoptimalkan keahlian berproses disertai karakter yang mulia. Selain itu, hendaknya memudahkan siswa dalam meraih hasil belajar maksimal dan memiliki nilai- nilai kearifan local yaitu *Tri Hita Karana*.

b. Bagi Guru

Produk pembelajaran ini mampu menunjang guru untuk meningkatkan implementasi pembelajaran di sekolah yang sifatnya kontekstual serta berdasarkan nilai kebudayaan spiritual guna menciptakan generasi cerdas maupun berkarakter.

c. Bagi Sekolah

Produk pengembangan ini mampu memberi masukan untuk sekolah pada pembentukan peraturan terkait implementasi pembelajaran di SMP dengan sifat kontekstual serta berasaskan nilai kebudayaan spiritual serta bermanfaat dalam menyediakan panduan untuk sekolah guna mengupayakan pendidikan karakter bagi generasi cerdas sekaligus berkarakter.

d. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini dapat diadopsi menjadi sumber rujukan pada pelaksanaan studi sejenis. Pada konteks ini, pengembangan yang berhubungan terhadap produk pada bidang pendidikan. Lebih spesifik, produk ini bisa dimanfaatkan menjadi referensi peneliti lain yang relevan terkait tema kearifan lokal dan pendidikan Multikultural.

1.7 Penjelasan Istilah

Pembelajaran IPS sebagai ilmu pengetahuan baru mulai dimasukkan dalam kurikulum sekolah tahun 1975 (SMP-SMA) dan tahun 1976 (SPG). Mata pelajaran ini berperan memfungsikan dan merealisasikan ilmu-ilmu sosial

yang bersifat teoritik ke dalam kehidupan nyata di masyarakat. Beberapa ahli pendidikan mengemukakan pendapat mengenai pengertian IPS. Menurut Djahiri dan Ma'um, IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.

Model PBL berbasis Tri Hita Karana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan berdasarkan domain dan nilai-nilai kearifan lokal yaitu *Tri Hita Karana*. Sintaks Model PBL pada hakikatnya terdiri dari 5 langkah. Diawali dengan mengorientasikan siswa pada masalah, yaitu kegiatan guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang diperlukan, memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Langkah kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yaitu kegiatan guru untuk membantu siswa membatasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu kegiatan guru untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan penelitian dan mencari untuk penjelasan dan pemecahan. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu kegiatan guru untuk membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Langkah terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu tugas guru untuk membantu siswa melakukan refleksi terhadap penyelidikan

dan proses – proses yang digunakan selama berlangsungnya pemecahan masalah.

Konsep *Tri Hita Karana* merupakan salah satu konsep kearifan lokal yang ada di masyarakat Bali yang hingga sekarang masih relevan untuk digunakan di tengah gempuran arus globalisasi yang ada. *Tri Hita Karana* bersumber dari tiga kata yaitu “Tri” maknanya tiga, “Hita” maknanya kebahagiaan serta “Karana” bermakna penyebab. Jadi *Tri Hita Karana* berarti tiga sebab kebahagiaan bagi kehidupan manusia (Anjarsari et al., 2017). Putriasih (2020), *Tri Hita Karana* bermakna tiga elemen yang menyebabkan kebahagiaan manusia melalui keberadaan hubungan baik terhadap tuhan, terhadap sesama maupun hubungan seimbang pada alam. Pada konsep *Tri Hita Karana* ini memfokuskan pada tiga hubungan manusia terhadap kehidupannya yaitu (1) Parahyangan (hubungan manusia dengan tuhannya atau penciptanya), (2) Pawongan (hubungan manusia dengan sesamanya) serta (3) Palemahan (hubungan manusia dengan sekitarnya atau lingkungannya) (Suarmini, 2019).

Kompetensi multikultural merupakan seperangkat sikap dan nilai-nilai hidup yang mengakui, menghargai, menghormati budaya, etnis, ras, dan agama orang lain tanpa adanya prasangka dan sikap yang negatif, sehingga tercipta demokratisasi dan kesederajatan antar budaya. Adanya pengakuan kesederajatan budaya antara minoritas dan mayoritas akan menciptakan hubungan yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki keragaman kultural seperti Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keterampilan multikultural dalam penelitian ini adalah kemampuan dan kemauan untuk menghargai, menyadari, memahami dan mengevaluasi budaya

orang lain.

Hasil belajar dimaknai sebagai pengalaman yang siswa peroleh dari pembelajaran. Febryananda & Rosy (2019) beranggapan hasil belajar ialah pemahaman yang siswa dapatkan setelah menyerap pembelajaran. Hasil belajar sebagai suatu pengalaman yang didapatkan dengan berbagai lingkup seperti pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Belajar tidak hanya sekedar menguasai prinsip belajar saja namun pembiasaan, pandangan, ketertarikan, minat-bakat, adaptasi sosial, keahlian, cita-cita, maupun harapan.

1.8 Novelty (Kebaharuan)

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa selama ini telah dilakukan berbagai penelitian mengenai model PBL. Penelitian yang dilakukan mengintegrasikan nilai – nilai kearifan lokal THK ke dalam Model PBL sehingga siswa dapat memiliki sikap multikultural di samping hasil belajar. Selain kajian tersebut, selama ini penerapan PBL berbasis THK, selama ini lebih dominan pada penerapan secara umum, artinya penerapan model PBL pengimplementasian langkah atau sintaksnya secara umum dan belum menyentuh atau mempertimbangkan pada aspek secara khusus karakteristik siswa di daerah atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini mengungkap konsep model PBL berbasis THK, secara umum konsep PBL dalam pembelajaran dapat dikatakan serupa, namun dalam pembelajaran yang dikemas akan membuat suasana PBL berbedaseperti biasanya, karena nilai – nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* diintegrasikan ke dalam sintak Model PBL dalam pembelajaran IPS-SMP.

Model PBL berbasis *Tri Hita Karana* menghasilkan produk berupa buku model pengembangan, RPP, buku guru dan buku siswa serta desain model PBL berbasis THK yang terkait dengan merumuskan suatu masalah dan memecahkan permasalahan, sehingga lebih mempertajam pada pengembangan sikap multicultural dan hasil belajar IPS.

Pelaksanaan model PBL berbasis THK di laksanakan dengan tahap;(1) memberikan orientasi permasalahan kepada siswa,(2) mengorganisasikan siswa untuk meneliti,(3) Membantu investigasi mandiri dan kelompok,(4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis,(5) mengevaluasi proses pemecahan masalah. Melalui sintak inilah akan diselipkan kearifan lokal *Tri Hita Karana*. Jadi dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pengintegrasian nilai – nilai Kearifan Lokal THK ke dalam Model PBL inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Pengintegrasian yang dilakukan diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang Pembelajaran PBL berbasis THK untuk meningkatkan sikap multikultural dan hasil belajar IPS siswa SMP.